

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR, DAN PROPOSISI

#### 2.1. Kajian Pustaka

Penelitian diawali dengan gagasan peneliti yang berasal dari kondisi asli di lapangan yang dihubungkan dengan teori dan konsep yang akan dikembangkan yang juga bersumber dari pengetahuan sebelumnya yang dijadikan *literature review*. Kajian pustaka membahas terkait dengan teori kepustakaan yang menyajikan penelitian guna mendukung berbagai pemecahan masalah sebagai dasar yang digunakan lanjutan terhadap analisis yang berhubungan dengan fokus penelitian. Teori yang terdapat di dalam kajian pustaka digunakan sebagai pisau analisis pada objek penelitian yang dalam hal ini adalah terkait dengan peranan Badan Usaha Miliki Desa (BUMDes) dalam meningkatkan Sektor Pariwisata di Desa Baros Kabupaten Bandung.

Peneliti mengidentifikasi *Grand Theory*, *Middle Theory*, dan *Applied Theory* sebagai landasan untuk mengkaji objek penelitian.

1. *Grand Theory*, merupakan induk keilmuan yang menjadi dasar lahirnya teori-teori lain di dalam suatu bidang keilmuan.
2. *Middle Theory*, merupakan kajian keilmuan yang berada pada level menengah untuk mengkaji objek penelitian.
3. *Applied Theory*, merupakan teori yang diaplikasikan secara langsung di dalam objek penelitian.

### 2.1.1. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu merupakan hasil penelusuran peneliti terhadap penelitian yang terdahulu yang menggambarkan tentang penemuan-penemuan yang relevan dengan fokus permasalahan yang dikaji peneliti. Hal tersebut dilakukan untuk memperkuat dan mendukung hasil penelitian yang dilakukan peneliti sehingga permasalahan yang dikaji layak untuk dijadikan topik penelitian. Karena penelitian terdahulu memiliki fungsi untuk memperluas dan memperdalam teori yang akan dipakai dalam kajian penelitian yang akan dilakukan. Secara umum penelitian terdahulu adalah sumber terdahulu/lampau dari hasil penelitian seseorang yang nantinya akan dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu juga berfungsi sebagai sumber inspirasi yang akan membantu pelaksanaan penelitian. Penelitian terdahulu juga menjadi bahan acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Berikut ini tabel yang akan menjelaskan penelitian-penelitian terdahulu:

**Tabel 2.1**

#### **Kajian Penelitian Terdahulu**

<b>Nomor</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Nama Peneliti</b>	Dwi Hastutik, Dwiningtyas Padmaningrum, dan Agung Wibowo	Kadek Sumiasih	Kokok Putra Siswanda dan Meurinawati
<b>Jenis Luaran Laporan Penelitian</b>	<i>Journal of Agricultural Extension</i> (AGRITEXTS)	Jurnal Magister Hukum Udayana	Publika
<b>Tahun</b>	2021	2018	2021

Nomor	1	2	3
<b>Judul (Title)</b>	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten	Peran BUMDes dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi di Desa Pakse Bali, Kabupaten Klungkung)	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Upaya Mengembangkan Wisata Embung di Desa Kertosari Kabupaten Pasuruan
<b>Latar Belakang (Historical Background)</b>	BUMDes memiliki peluang untuk berperan strategis dalam meningkatkan perekonomian desa, namun faktanya masih banyak BUMDes yang belum berhasil. BUMDes Tirta Mandiri yang terletak di Desa Ponggok menjawab fenomena mampu memperoleh prestasi sebagai BUMDes BUMDes pemenang kategori Desa Wisata Pemberdayaan Masyarakat (Nurhayati, 2018). Selain prestasi melalui penghargaan, kinerja BUMDes Tirta Mandiri juga dibuktikan dengan perolehan pendapatan kotor 150 juta (tahun 2012) menjadi 12 miliar (tahun 2017). Keberhasilan tersebut bisa menjadi indikator berjalannya peran BUMDes yang seharusnya dalam upaya peningkatan perekonomian desa. Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini dilakukan untuk	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata bisa dalam hal menjalankan usaha pariwisata atau sarana pariwisata, seperti daya tarik wisata, kawasan wisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, jasa pramuwisata, wisata tirta, Spa serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran. Salah satu daerah di Indonesia yang menjadi sasaran kunjungan banyak wisatawan adalah Bali.2 Jumlah kunjungan wisatawan ke Bali setiap tahun terus meningkat. Sesuai data statistik dari Dinas Pariwisata Pemerintah Daerah Provinsi Bali, tercatat kedatangan wisatawan internasional	Peran BUMDES termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang hasil BUMDES bermanfaat di samping membangun desa, pemberdayaan masyarakat, serta membantu masyarakat kurang mampu lewat hibah, bantuan sosial, dana bergilir dipatenkan dalam rancangan hasil dan belanja desa. BUMDES sepenuhnya dikelola masyarakat desa, yakni dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDES yakni mewadahi kegiatan ekonomi masyarakat dalam wujud lembaga atau badan usaha profesional, tetap berdasar pada potensi murni desa. BUMDES menjadi badan hukum, wujud berdasar ketentuan undang-undang, menyesuaikan wujud sepakat bersama masyarakat desa.

Nomor	1	2	3
	<p>menganalisis (1) Sejarah Desa Wisata Ponggok; dan (2) Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirta Mandiri dalam pengembangan desa wisata. Pengembangan desa wisata di Desa Ponggok dilakukan dengan mengoptimalkan potensi desa bidang perairan. Komponen terpenting dalam desa wisata, adalah akomodasi yaitu sebagian dari tempat tinggal penduduk setempat atau unit-unit yang berkembang sesuai dengan tempat tinggal penduduk, dan atraksi yaitu seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat beserta latar fisik lokasi desa yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai partisipan aktif, seperti kursus tari, bahasa, lukis, dan hal-hal lain yang spesifik. Penelitian mengenai peran BUMDes dalam pengembangan Desa Wisata Ponggok ini penting dilakukan, karena BUMDes merupakan salah satu lembaga yang saat ini banyak dibicarakan. Hampir seluruh desa di</p>	<p>pada tahun 2015 sejumlah 4.001.835 orang, tahun 2016 ada 4.927.937 orang dan 2017 sejumlah 5.697.793.3 Adapun jumlah kedatangan wisatawan lokal tahun 2015 adalah 7.147.100 orang, tahun 2016 sebanyak 8.634.680 orang dan tahun 2017 sebanyak 8.735.633 orang. 4 Pariwisata di Bali memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebab sangat banyak desa di Bali yang memiliki potensi wisata. Banyaknya potensi wisata desa di Bali membutuhkan adanya pengelolaan yang efektif, dalam hal ini, dibutuhkan suatu lembaga atau badan usaha yang dapat mengelola potensi wisata tersebut serta memberdayakan masyarakat secara langsung, salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun, di Bali masih terdapat desa-desa yang belum melaksanakan kebijakan pemerintah yaitu belum memiliki BUMDes, terlebih pada desa yang memiliki potensi wisata. Pemerintah daerah di Bali juga belum secara</p>	<p>Dengan didirikannya BUMDES tersebut difokuskan pada peran BUMDES dalam mengelola wisata salah satunya dalam upaya mengembangkan Wisata Embung di Desa Kertosari, dengan harapan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, dan menyejahterakan masyarakat desa. Kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan sosial merupakan sesuatu yang dapat dimungkinkan dimiliki seluruh masyarakat akan tetapi dalam mendapatkan kesejahteraan sosial juga memerlukan suatu proses atau strategi yang tidak mudah (Sen, 1973). Embung di Desa Kertosari sebelumnya hanya digunakan untuk irigasi saja, namun seiring berjalannya waktu atas peran BUMDES berkembang menjadi wisata air atau destinasi air. BUMDES setempat melakukan pembangunan stan-stan kuliner, dan</p>

Nomor	1	2	3
	<p>Indonesia mulai mendirikan BUMDes, namun masih sedikit yang berhasil menyejahterakan masyarakatnya. Belum berhasilnya BUMDes dikarenakan beberapa faktor, mulai dari sumber daya manusia dan kesalahan memilih pengembangan potensi. Tujuan dilakukan penelitian mengenai Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengembangan Desa Wisata Ponggok yaitu untuk menganalisis proses terbentuknya desa wisata dan menganalisis peran BUMDes dalam pengembangan Desa Wisata Ponggok.</p>	<p>menyeluruh mendorong pembentukan dan pengelolaan BUMDes, masih ada desa yang belum tersentuh pembinaan, dan hal ini menyebabkan kurang terpacunya semangat desa untuk segera mengelola BUMDes. Pada beberapa desa, BUMDes yang sudah terbentuk tidak berjalan dengan lancar dan sebagian tidak aktif tanpa dikelola kembali secara serius. Ada pula desa yang memiliki potensi wisata namun tidak mengembangkan potensinya melalui BUMDes unit usaha wisata dan hanya terpaku pada unit usaha simpan pinjam. Pengembangan pariwisata pun menjadi belum optimal dikarenakan kurang dilibatkannya BUMDes dalam memfasilitasi pengelolaan pariwisata yang ada.</p>	<p>pengadaan perahu untuk mendukung konsep wisata air atau destinasi air yang menjadi target pengembangan Wisata Embung di Desa Kertosari. Banyak wisata yang ada di Desa Kertosari Kabupaten Pasuruan, seperti: Randuwana <i>Learning Center</i>, <i>Kampoeng Tarzan</i>, <i>Kampung Buah Tin</i>, <i>Rafting</i>, dan ini salah satu wisata yang menarik adalah Wisata Embung. Wisata Embung terletak di Dusun Gunungsari, Desa Kertosari. Memiliki luas mencapai 2,5 hektar. Embung didirikan sejak tahun 2010, hingga saat ini telah memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, khususnya sebagai pemasok kebutuhan irigasi di semua area pertanian yang ada di Desa Kertosari. Wisatawan yang datang berkunjung dapat bersantai dengan berkeliling embung menggunakan sepeda air, dan perahu. Selain itu, wisatawan juga dapat bersantai di gazebo untuk melihat</p>

Nomor	1	2	3
			<p>pemandangan alam sekitar yang indah. Dalam mendukung perkembangan Desa Kertosari, BUMDES Kertosari terus berinovasi agar Wisata Embung tidak membosankan bagi wisatawan yang datang berkunjung. Segala sesuatu pengelolaan BUMDES Kertosari masih mengalami beberapa kendala dalam mengembangkan Wisata Embung, dikarenakan belum dapat dijalankan sebagaimana mestinya, hal ini seperti yang disampaikan oleh Tegu Suhendra selaku Pengurus BUMDES Kertosari di Bidang Pariwisata: “Dalam pelaksanaan pengelolaan BUMDES Kertosari, ketersediaan dokumen, dan informasi hasil pengelolaan tidak disediakan oleh pengelola BUMDES tersebut, sehingga masyarakat sedikit kesulitan untuk mengakses dokumen, dan informasi Tentang pengelolaan BUMDES tersebut”.</p>

Nomor	1	2	3
<b>Konteks Kekinian</b> <i>(Current Context)</i>	Menggunakan analisis proses terbentuknya desa wisata dan peran BUMDes dalam pengembangan Desa Wisata	Memfokuskan penelitian kepada eksistensi BUMDes dan pengelolaan di sektor Pariwisata serta analisis pengelolaan sektor pariwisata yang dapat difasilitasi BUMDes	Memfokuskan untuk mengetahui, mendeskripsikan, memberikan informasi, dan menambah wawasan peneliti, pembaca, maupun masyarakat Tentang peran BUMDES dalam upaya mengembangkan Wisata Embung di Desa Kertosari.
<b>Teori-teori yang telah dan sedang digunakan peneliti lain</b> <i>(Theoris Underpinning)</i>	Peran BUMDes ditinjau dari peran pemerintah maupun swasta dalam pengembangan desa wisata menyangkut tiga hal, yaitu kesadaran ( <i>conscientization</i> ), pengorganisasian masyarakat ( <i>community organizing</i> ), dan pengantaran sumber daya manusia ( <i>resources delivery</i> ) (Hadiwijoyo, 2018).	tiga dimensi kajian filsafat yakni Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi	Teori Organisasi Publik menurut Mardiasmo (2009:8) Di antaranya lima indikator yaitu: tujuan organisasi, sumber pendanaan, pertanggung-jawaban, struktur organisasi, dan karakteristik anggaran.
<b>Terminologi Metode Penelitian</b>	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja ( <i>purposive sampling</i> ). Teknik penentuan informan yang digunakan yaitu <i>purposive sampling</i> .	Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumen dan teknik wawancara. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini	Penelitian yang digunakan oleh yakni menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan metode wawancara, analisis data bersifat induktif. Teknik dalam mengumpulkan data dilakukan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan

Nomor	1	2	3
	<p>Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan reduksi data, penyajian data (<i>data display</i>), dan menarik kesimpulan/ verifikasi.</p>	<p>adalah analisis data kualitatif.</p>	<p>menggunakan kumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta simpulan.</p>
<p><b>Hasil Penelitian</b> (<i>Significant</i>)</p>	<p>berawal dari terdapatnya umbul di Desa Ponggok yang kemudian dikembangkan oleh pemerintah desa bekerja sama dengan tim selam, tim SAR, dan perguruan tinggi untuk melakukan kegiatan pemetaan dan penggalian potensi dan dijadikan sebagai wisata. Hingga pada tahun 2009 pemerintah Desa Ponggok mendirikan BUMDes Tirta Mandiri yang selanjutnya mengelola Desa Wisata Ponggok sampai saat ini. Peran BUMDes dalam pengembangan Desa Wisata Ponggok yaitu peran penyadaran (<i>conscientization</i>) dengan melakukan</p>	<p>Eksistensi BUMDes di Indonesia secara keseluruhan telah mengalami perkembangan dengan semakin bertambahnya jumlah desa yang membentuk BUMDes. Keberadaan BUMDes di Bali dapat diterima sebagai sarana peningkatan kesejahteraan, namun masih terdapat desa di Bali termasuk desa yang memiliki potensi wisata belum membentuk BUMDes. Hal tersebut disebabkan oleh kendala seperti kurangnya pemahaman perangkat desa mengenai BUMDes, keterbatasan SDM pengelola BUMDes, kurangnya pengetahuan dan kemampuan</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian deskriptif kualitatif, wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dilaksanakan Tentang Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Upaya Mengembangkan Wisata Embung Kertosari, Pasuruan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Wisata Embung berkembang atas peran BUMDES Kertosari. Sejak didirikan Embung pada tahun 2010, pada tahun 2017 bulan Desember akhirnya didirikan BUMDES. 2. Embung di Desa</p>



Nomor	1	2	3
	<p>kegiatan sosialisasi dan juga dengan memberikan bukti hasil kerja, peran pengorganisasian masyarakat (<i>community organizing</i>), melalui kegiatan penyaluran aspirasi dan pembagian unit usaha di BUMDes Tirta Mandiri, serta peran pengantaran sumber daya manusia (<i>resource delivery</i>), dengan melakukan kegiatan pelatihan sumber daya manusia. Saran terkait dengan penelitian di atas yaitu, perlunya peningkatan promosi melalui media sosial agar tidak kehilangan pengunjung. Untuk meningkatkan peran BUMDes dalam pengembangan desa wisata perlu adanya kegiatan pelatihan terkait pengelolaan limbah (sampah).</p>	<p>masyarakat mengelola usaha, belum maksimalnya sosialisasi, pembinaan dan pengawasan oleh pihak pemerintah, belum maksimalnya pengalokasian modal dan kurang digalinya potensi desa. Pengelolaan sektor pariwisata melalui BUMDes Pakse Bali dilakukan dengan memperhatikan unsur pengelolaan seperti jenis sektor wisata, modal, pengelola, pola pengelolaan, strategi pemasaran, pertanggungjawaban, dan pembagian hasil secara efektif dan terstruktur sehingga dapat dijadikan contoh oleh desa lain yang belum mampu mengelola potensi wisatanya. Mengingat adanya desa di Bali yang belum memiliki BUMDes dan belum tersentuh pembinaan secara menyeluruh terlebih pada desa yang memiliki potensi wisata, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali hendaknya membentuk</p>	<p>Kertosari sebelumnya hanya digunakan untuk irigasi saja, namun seiring berjalannya waktu atas peran BUMDES berkembang menjadi wisata air atau destinasi air. 3. Banyak wisata yang ada di Desa Kertosari Kabupaten Pasuruan, seperti: <i>Randuwana Learning Center</i>, <i>Kampoeng Tarzan</i>, <i>Kampung Buah Tin</i>, <i>Rafting</i>, dan ini salah satu wisata yang menarik adalah Wisata Embung. 4. Faktor pendukung perkembangan Desa Kertosari, BUMDES Kertosari terus berinovasi agar Wisata Embung tidak membosankan bagi wisatawan yang datang berkunjung. Faktor penghambat perkembangan Desa Kertosari, Pengelolaan BUMDES Kertosari masih mengalami beberapa kendala dalam mengembangkan Wisata Embung, dikarenakan belum dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Ketersediaan dokumen, dan</p>

Nomor	1	2	3
		<p>satuan tugas yang khusus melakukan pendampingan dan pembinaan BUMDes di masing-masing kabupaten di Bali, sehingga seluruh desa di Bali dapat mendirikan BUMDes dengan manajemen operasional yang baik sesuai dengan potensinya masing-masing.</p>	<p>informasi hasil pengelolaan tidak disediakan oleh pengelola BUMDES tersebut, sehingga masyarakat sedikit kesulitan untuk mengakses dokumen, dan informasi Tentang pengelolaan BUMDES tersebut.5. BUMDES Kertosari rutin per tahun mengemukakan laporan pertanggung-jawaban pada musyawarah pertanggung jawaban. Diadakan rutin per tahun dengan diikuti BPD, tokoh masyarakat, pemuda, PKK, dan juga karang taruna Desa Kertosari.</p>
<p><b>Penjelasan Keunggulan penelitian yang kita lakukan</b></p>	<p>Bagian dari konsep peranan BUMDes terhadap sektor pariwisata</p>	<p>Bagian dari konsep peranan BUMDes terhadap sektor pariwisata</p>	<p>Bagian dari konsep peranan BUMDes terhadap sektor pariwisata</p>
	<p>Berfokus kepada peran penyadaran (<i>conscientization</i>) dengan melakukan kegiatan sosialisasi dan juga dengan memberikan bukti hasil kerja, peran pengorganisasian masyarakat (<i>community organizing</i>), melalui kegiatan penyaluran aspirasi dan pembagian unit usaha di BUMDes Tirta Mandiri, serta peran pengantaran sumber daya manusia</p>	<p>BUMDes Pakse Bali berfokus pada keunggulan di bidang pengelolaan pariwisata. Penguatan kualitas di sektor pariwisata oleh BUMDes Pakse Bali adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola BUMDes. BUMDes Pakse Bali juga mempunyai perencanaan bahwa dalam mengembangkan sektor pariwisata akan</p>	<p>Lebih memfokuskan kepada lima indikator yaitu: tujuan organisasi, sumber pendanaan, pertanggungjawaban, Struktur organisasi, serta karakteristik anggaran.</p>

Nomor	1	2	3
	<i>(resource delivery)</i> , dengan melakukan kegiatan pelatihan sumber daya manusia.	melakukan kerja sama dengan BUMDes di desa lain	
	Keunggulan dari penelitian yang dilakukan terkait dengan peraturan, kebijakan, dan hak kewajiban pada peranan BUMDes dalam meningkatkan potensi Sektor Pariwisata di Desa Baros Kabupaten Bandung.	Keunggulan dari penelitian yang dilakukan terkait dengan peraturan, kebijakan, dan hak kewajiban pada peranan BUMDes dalam meningkatkan potensi Sektor Pariwisata di Desa Baros Kabupaten Bandung.	Keunggulan dari penelitian yang dilakukan terkait dengan peraturan, kebijakan, dan hak kewajiban pada peranan BUMDes dalam meningkatkan potensi Sektor Pariwisata di Desa Baros Kabupaten Bandung.

Sumber: Dwi Hastutik, Dwiningtyas Padmanigrum, Agung Wibowo (Jurnal), Kadek Sumiasih (Jurnal), Kokok Putra Suswanda, Meurinawati (Jurnal)

Berdasarkan hasil penelusuran penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan objek yang dikaji oleh peneliti maka judul penelitian oleh peneliti yaitu **“Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Sektor Pariwisata di Desa Baros Kabupaten Bandung”** layak untuk dikaji dan diteliti. Setelah memahami hasil penelusuran terdahulu maka dapat diketahui keaslian dan keabsahan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sehingga dengan demikian penelitian terdahulu menambah khazanah keilmuan yang dapat mendukung peneliti untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas dan orisinal serta adanya penelitian terdahulu dapat dijadikan panduan dalam melakukan penelitian.

Peneliti mengkaji permasalahan yang lebih memfokuskan terhadap aturan yang ditetapkan BUMDes, kemudian kebijakan yang telah dilakukan BUMDes, dan hak serta kewajiban BUMDes yang telah dijalankan BUMDes Baros untuk meningkatkan sektor wisata di Desa Baros Kabupaten Bandung sehingga hal ini menjadi sebuah kebaruan yang digagas oleh peneliti dalam mengkaji peran BUMDes dalam meningkatkan sektor pariwisata desa.

## **2.1.2. Kajian Administrasi**

### **2.1.2.1. Pengertian Administrasi**

Administrasi selalu ada sebagai pola pikir yang dijadikan pedoman untuk melakukan aktivitas manusia agar pelaksanaan berbagai tindakan yang direncanakan sebelumnya tidak gagal. Administrasi berkaitan dengan implementasi kebijakan untuk mencapai sebuah tujuan. Administrasi mencakup segala sesuatu dari membuat catatan hingga melakukan sebuah pembukuan sederhana hingga menyiapkan agenda yang lebih rumit. Administrasi sering digambarkan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan melalui pemanfaatan sarana dan prasarana secara efektif dan efisien.

Secara etimologis administrasi diartikan sebagai aktivitas yang mengelola informasi, mengelola manusia, dan juga mengelola harta benda untuk menuju suatu tujuan dalam sebuah organisasi. Dalam artian administrasi

berkaitan langsung dengan kegiatan kerja sama yang dilakukan manusia atau kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Kemudian menurut **Handyaningrat** dalam bukunya yang berjudul **“Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen (1996:2)”** menyatakan administrasi dalam arti sempit bahwa “Administrasi adalah kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan (*clerical work*).”

Sedangkan pengertian administrasi secara luas menurut **Siagian (dalam Ayub 2007:30)** administrasi dalam pengertian luas adalah “keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Apabila melihat pendapat dari **Sondang P Siagian**, administrasi dapat diilustrasikan seperti pemain sepak bola yang melakukan sebuah kerja sama bersama pemain lainnya untuk memenangkan timnya dalam sebuah pertandingan.

Kemudian pengertian administrasi dalam arti luas menurut ahli lainnya, yaitu **Nawawi (2009:35)**, mengatakan bahwa: “Administrasi dalam arti luas adalah proses rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang secara dinamis dalam kerja sama dengan pola pembagian kerja untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu yang rasional, secara efektif dan efisien”.

Selanjutnya, **Silallahi** mengkaji administrasi secara luas dalam bukunya *Studies on Administrative Sciences (2016:5)* bahwa, “Administrasi merupakan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain”

Pendapat dari **Soewarno Handayani** yang menjelaskan administrasi secara sempit ada kesamaan dengan pendapat dari **Sondang P. Siagian, Ismail Nawawi, dan Ulbert Silallahi** yang menjelaskan administrasi secara luas mengenai kerja sama (ketatausahaan) yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan bersama.

Berdasarkan pengertian mengenai administrasi menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa administrasi dapat dikatakan sebagai proses kerja sama yang melibatkan sedikitnya dua orang untuk mencapai sasaran atau tujuan yang sudah ditentukan sebelum mereka memulai kegiatan. Kemudian administrasi juga bisa dikatakan sebagai pengumpulan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis untuk memudahkan dalam memperoleh data pada saat dibutuhkan di kemudian hari. Administrasi merupakan unsur yang krusial dalam proses penyelenggaraan organisasi. Tercapai atau tidaknya tujuan yang telah ditetapkan tergantung pada proses kinerja administrasi yang berjalan dalam organisasi.

### 2.1.2.2. Pengertian Administrasi Negara

Administrasi Negara secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses kerja sama yang dilakukan oleh semua aparatur Negara yang telah di tentukan sebelumnya.

Menurut **Dimock dikutip Anggara (2012:134)** mengatakan bahwa,

“Administrasi Negara merupakan bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan lebih luas, yaitu Ilmu Pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga-lembaga mulai dai satu keluarga sehingga perserikatan bangsa-bangsa disusun, digerakkan, dan dikemukakan.”

Menurut **Waldo dikutip Syafei (2003:33)** mengatakan bahwa, Administrasi negara adalah manajemen dan organisasi dari manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah.

Sependapat dengan pernyataan di atas yang dikemukakan oleh **Gordon yang dikutip Syafei (2003:33)** bahwa, “Administrasi negara adalah seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dilakukan oleh badan legislatif, eksekutif, serta peradilan.”

Administrasi negara menurut **Lichfield dikutip Syafei (2003:33)** menjelaskan bahwa, “Administrasi negara adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintah diorganisir, diperlengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan, dan dipimpin.”

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas peneliti menyimpulkan bahwa administrasi Negara lebih kepada aktivitas kenegaraan. Objek disiplin ilmu administrasi Negara adalah pelayanan publik sehingga yang perlu dikaji adalah keberadaan berbagai organisasi publik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa administrasi Negara sangat penting dipelajari oleh setiap masyarakat yakni untuk memahami akan arti pentingnya kegiatan administrasi dalam suatu Negara yang dikaitkan dengan kewenangan publik.

### **2.1.2.3. Pengertian Administrasi Publik**

Kehadiran administrasi dalam suatu negara merupakan suatu keharusan dan kebutuhan karena negara merupakan sebuah organisasi. Administrasi merupakan keteraturan yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Administrasi publik merupakan bagian dari adanya proses perubahan dalam khazanah keilmuan pada penyelenggaraan negara. Di mana pada sebelumnya administrasi publik adalah administrasi negara yang hanya berfokus pada pencapaian tujuan-tujuan negara sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam berbagai kebijakan melalui instansi pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang sebagai motor penggerakannya.

Dengan demikian meskipun administrasi negara dan administrasi publik sama-sama berfokus pada pencapaian tujuan negara, namun terdapat perbedaan yaitu administrasi publik berorientasi kepada pelayanan publik sehingga kepentingan publik menjadi unsur yang paling diutamakan. Administrasi publik



memiliki ruang lingkup yang lebih luas yaitu mengatur mekanisme dan peranan negara dalam berkontribusi pada semua lini tata kelola pemerintahan.

Menurut **Chandler dan Plano dalam Keban (2004:3)** menyatakan bahwa, “Administrasi Publik adalah proses di mana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik”.

Kemudian administrasi publik menurut **Pasolong (2007:8)** menyatakan bahwa, “Administrasi Publik adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif”.

Adapun menurut **Wilson (1887)** bahwa administrasi publik diartikan sebagai “Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang menyangkut kepentingan publik atau masyarakat, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun pihak non-pemerintah atau masyarakat itu sendiri”.

Kemudian menurut **Ahmad** yang dikutip oleh **Sellang (2016:48)** dalam bukunya yang berjudul “**Administrasi dan Pelayanan Publik Antara Teori dan Aplikasinya**” ruang lingkup administrasi publik meliputi:

1. Kebijakan Publik
2. Birokrasi Publik
3. Manajemen Publik
4. Kepemimpinan
5. Pelayanan Publik
6. Kinerja
7. Etika Administrasi

Administrasi publik menjadi unsur yang sangat fundamental di dalam penyelenggaraan sistem birokrasi pemerintah. Dengan demikian administrasi harus mampu menjadi wadah dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemanfaatan sumber daya. Hal ini didukung dengan pernyataan **Gordon** yang dikutip Oleh **Henry** terjemahan **Lontoh (1993:21)** dalam bukunya “**Administrasi Negara dan Masalah-masalah Kenegaraan**” bahwa,

“Birokrasi pemerintah semakin dituntut untuk menerapkan unsur-unsur efisiensi agar penggunaan sumber daya berlangsung secara optimal di sektor publik. Selain itu dituntut adanya keahlian administratif sehingga dapat diwujudkan pemerintahan yang efisien, atau dengan perkataan lain pejabat dalam administrasi pemerintah dapat ditingkatkan menjadi lebih profesional”

Dengan demikian, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa administrasi publik adalah urusan semua orang yang bertindak di pihak publik (di pihak masyarakat dengan cara yang diamanatkan secara sah) dan Tindakan mereka mempunyai konsekuensi terhadap anggota masyarakat, sebagai perseorangan atau kelompok. Semua orang yang terlibat dalam administrasi publik membuat keputusan berdasarkan hukum publik dan regulasi. Akan tetapi, selain itu keputusan mereka mencerminkan pertimbangan pribadi berdasarkan nilai dan penilaian yang muncul dari konfigurasi unik faktor-faktor yang ada dalam situasi tertentu. Keputusan, sebagaimana pertimbangan yang mendasarinya, muncul dari saling mempengaruhi antara hal yang umum dan khusus, yang personal dan impersonal.

### 2.1.3. Pengertian Organisasi

Secara sederhana organisasi dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang merupakan wadah atau sarana untuk mencapai berbagai tujuan atau sasaran organisasi memiliki banyak komponen yang melandasi di antaranya terdapat banyak orang, tata hubungan kerja, spesialis pekerjaan dan kesadaran rasional dari anggota sesuai dengan kemampuan dan spesialisasi mereka masing-masing.

Dalam buku **Rernawan (2011:15)**, dikutip pengertian organisasi dari **Mathis and Jackson** sebagai berikut,

“Organisasi merupakan suatu kesatuan sosial dari sekelompok manusia yang saling berinteraksi menurut suatu pola tertentu sehingga setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing, sebagai suatu kesatuan yang memiliki tujuan tertentu dan mempunyai batas-batas yang jelas, sehingga bisa dipisahkan”.

Dalam buku **Hasibuan (2014:24)**, terdapat kutipan pengertian organisasi menurut **Allen**, sebagai berikut: “Organisasi sebagai proses penentuan dan pengelompokan pekerjaan yang akan dikerjakan, menetapkan dan melimpahkan wewenang dan tanggung jawab dengan maksud untuk memungkinkan orang-orang bekerja sama secara efektif dalam mencapai tujuan”.

Sementara itu, dalam buku **Wursanto (2005:53)** terdapat beberapa kutipan pengertian organisasi, di antaranya adalah pendapat **Yoseph Kingsbury dan Robert Wilcox**: “Organisasi adalah sebagai proses pembagian tugas atau pekerjaan, mengatur pegawai-pegawai untuk memikul tugas atau pekerjaan dari suatu badan usaha”.

Begitu juga dalam **buku Sobirin (2007:5)** terdapat kutipan mengenai pengertian organisasi, di antaranya adalah pendapat **Robbins**, “Organisasi adalah unit sosial yang sengaja didirikan untuk jangka waktu yang relatif lama, beranggotakan dua orang atau lebih yang bekerja bersama-sama dan terkoordinasi, mempunyai pola kerja tertentu yang terstruktur, dan didirikan untuk mencapai satu tujuan tertentu”.

Ciri-ciri organisasi dikemukakan **Ferland** yang dikutip oleh **Handyaningrat (1990:3)** sebagai berikut:

1. Adanya suatu kelompok orang yang dapat dikenal
2. Adanya kegiatan yang berbeda-beda tetapi satu sama lain saling berkaitan (*interdependent part*) yang merupakan kesatuan usaha / kegiatan
3. Tiap-tiap anggota memberikan sumbangan usahanya / tenaganya
4. Adanya kewenangan, koordinasi dan pengawasan
5. Adanya suatu tujuan

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah suatu wadah yang terdiri dari unsur manusia yang saling bekerja sama dan saling menguntungkan untuk kepentingan bersama dalam pencapaian tujuan organisasi. Organisasi selain dipandang sebagai wadah kegiatan orang juga dipandang sebagai proses, yaitu menyoroti interaksi di antara orang-orang yang menjadi anggota organisasi. Keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang saling berinteraksi dan mengembangkan organisasi yang bersangkutan. Organisasi dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam rangka mengoptimalkan kinerja pegawai tidak terlepas dari pemberdayaan potensi yang ada.

## 2.1.4. Konsep Desa

### 2.1.4.1. Pengertian Desa

Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat. Secara etimologi kata “desa” berasal dari bahasa *Sansekerta* “*Deca*” yang berarti tanah, tanah asal, atau tanah kelahiran.

Menurut **Daldjoeni (2011:4)** dalam buku **Interaksi Desa Kota** bahwa “Desa dalam arti umum dapat dikatakan sebagai pemukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya bermata pencaharian dengan bertani atau bercocok tanam”.

Kemudian **Bintaro (2010:6)** dalam buku **Desa Kota** menyatakan bahwa,

“Desa dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu merupakan suatu wujud atau ketampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah.”

Kemudian menurut **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979** mengartikan desa sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri di dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya dipertegas juga dengan **Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat 12** bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian menurut **Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa**, desa memiliki wewenang, yaitu:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan asal-usul desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/kota.
4. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

#### **2.1.4.2. Desa Wisata**

Menurut **Nuryanti** dalam **buku Panduan Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Lokal (2015:7)** bahwa, “Desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku”.

Kemudian menurut **Subagyo** dalam **buku Panduan Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Lokal (2015:7)** menyatakan bahwa,

“Jika dilihat dari kehidupan masyarakatnya, pariwisata pedesaan adalah suatu bentuk wisata dengan objek dan daya tarik berupa kehidupan desa yang memiliki ciri-ciri khusus dalam masyarakatnya, panorama alamnya, dan budayanya sehingga mempunyai peluang dijadikan komoditi bagi wisatawan khususnya wisatawan asing.”

Kehidupan desa sebagai tujuan wisata adalah desa sebagai objek dan sebagai subjek dari kepariwisataan yaitu sebagai pihak penyelenggaraan sendiri dari berbagai aktivitas kewisataan dan hasilnya akan dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Oleh karenanya peran aktif masyarakat sangat menentukan kelangsungan kegiatan pariwisata tersebut. Keberhasilan desa wisata dipengaruhi oleh intensitas kegiatan, lokasinya, manajemen, dan dukungan dari masyarakat lokal dan harus sesuai dengan keinginan masyarakat lokal dan tidak direncanakan secara sepihak.

#### **2.1.4.3. Pemerintah Desa**

Pemerintah desa adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Menurut **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014** menyatakan bahwa pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lembaga pemerintah desa diatur melalui **Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintah desa** yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan **Pasal 2016**

**Ayat 1 Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah**

yang mengartikan pemerintah daerah sebagai kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah. Daerah otonom menurut undang-undang ini adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara Republik Indonesia. Pemimpin pemerintah desa seperti yang tertuang pada **Pasal 14 Ayat 1** adalah kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Menurut **Nurcholis (2014:22)** menyatakan bahwa pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan pemerintah desa yang mempunyai tugas pokok:

1. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat.
2. Menjalankan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

**2.1.4.4. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Secara etimologi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berasal dari beberapa kata yaitu badan usaha yang berarti kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan sedangkan milik dapat diartikan sebagai kepemilikan atau kepunyaan sementara Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh keluarga yang mempunyai sistem pemerintah sendiri. Dengan demikian BUMDes merupakan usaha yang



dilakukan oleh sistem pemerintahan yang terdapat hukum yang menaungi secara teknis dalam sektor perekonomian masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes menurut **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah** didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Di samping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Menurut **Maryunani** dalam **Buku Panduan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan Pemberdayaan Pemerintah Desa (2008)** menyatakan bahwa,

“BUMDes merupakan lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa dan juga merupakan suatu lembaga usaha yang memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan dan laba”

Jadi dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Pada akhirnya BUMDes dibentuk dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes), memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Tujuan BUMDes yaitu mengoptimalkan pengelolaan aset-aset desa yang ada, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sifat usaha BUMDes adalah berorientasi pada keuntungan. Sifat pengelolaan usahanya adalah keterbukaan, kejujuran, partisipatif dan berkeadilan. Dan fungsi BUMDes adalah: sebagai motor penggerak perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Kemudian dalam lanjutannya **Maryunani** menjelaskan bahwa terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola bersama masyarakat.
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui pernyataan modal (saham atau andil).
3. Operasionalnya menggunakan falsafah bisnis yang berakal dari budaya lokal.
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar.

5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa.
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemerintah desa, BPD, dan anggota).

Kemudian juga terdapat prinsip pengelolaan BUMDes menurut

**Maryunani** dalam **Buku Panduan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan Pemberdayaan Pemerintah Desa (2008)** yaitu:

1. BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut direalisasi di antaranya dengan memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktik *ijo* (rante) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan usaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
2. Dalam pengelolaan BUMDes diprediksikan tetap melibatkan orang ketiga yang tidak terdampak di antara masyarakat desa itu sendiri. Pendirian BUMDes yang diinisiasi oleh masyarakat harus tetap mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi desa yang mendukung pembayaran pajak di desa dan kepatuhan masyarakat desa terhadap kewajibannya.

Selanjutnya menurut **Purnomo** dalam buku **Pembangunan BUMDes dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (2004:17)** menyatakan bahwa maksud pembentukan Badan Usaha Milik Desa antara lain:

1. Menumbuh kembangkan perekonomian desa.
2. Meningkatkan sumber Pendapatan Asli Desa (PADes)
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi peruntukan hajat hidup masyarakat desa.
4. Sebagai perintis bagi kegiatan usaha di desa.

Adapun tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa, yaitu:

1. Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
2. Menumbuh kembangkan kegiatan ekonomi masyarakat desa dalam unit-unit usaha desa.
3. Menumbuh kembangkan usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di desa.
4. Meningkatkan kreativitas berwirausaha masyarakat desa yang berpenghasilan.

Kemudian dalam buku yang dikeluarkan **Departemen Pendidikan Nasional** yang berjudul **Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (2007)** menyatakan bahwa prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi dan diuraikan agar dipahami dan bisa dipersiapkan dengan baik oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat yang di mana terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

1. Kooperatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan keberlangsungan hidup usaha.
2. Partisipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta untuk memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
3. Emansipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
4. Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
5. Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administrasi.
6. *Sustainable*, kegiatan usaha harus dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Dalam lanjutannya dijelaskan juga bahwa usaha yang dapat dijalankan melalui BUMDes antara lain,

1. Pasar desa
2. Waserda
3. Transportasi
4. Industri rumahan
5. Perikanan darat
6. Pertanian
7. Simpan pinjam
8. Sumber air
9. Objek wisata desa
10. Kerajinan rakyat
11. Peternakan
12. Argo industri

Kemudian menurut **Sholeh** dalam buku **Dialektika Pengembangan Dengan Pemberdayaan (2014:83)** dalam mengelola BUMDes terdapat beberapa asas yaitu:

1. Asas kesukarelaan, yaitu keterlibatan seseorang dalam kegiatan pemberdayaan melalui kegiatan pemberdayaan melalui kegiatan BUMDes harus dilakukan tanpa adanya paksaan, tetapi atas dasar keinginannya sendiri yang didorong oleh kebutuhan untuk memperbaiki dan memecahkan masalah kehidupan yang dirusakny.
2. Asas kesetaraan, yaitu semua pihak pemangku kekuasaan yang berkecimpung di BUMDes memiliki kedudukan dan posisi yang setara, tidak ada yang ditinggikan dan tidak ada yang direndahkan.
3. Asas musyawarah, yaitu semua pihak diberikan hak untuk mengemukakan gagasan atau pendapatnya dan saling menghargai perbedaan pendapat. Dalam pengambilan keputusan harus dilakukan musyawarah untuk mencapai mufakat.
4. Asas keterbukaan, dalam hal ini semua yang dilakukan kegiatan BUMDes dilakukan secara terbuka sehingga tidak menimbulkan kecurigaan, dan memupuk rasa saling percaya, sikap jujur, dan saling peduli satu sama lain.

Kemudian menurut **Seyadi** dalam **bukunya BUMDes Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa (2003:16)** menyatakan bahwa peran BUMDes adalah sebagai:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa yang pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai fondasinya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
5. Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

#### **2.1.5. Pengertian Pariwisata**

Pariwisata dalam arti etimologis berasal dari bahasa *Sansekerta* yang terdiri dari dua kata yaitu “Pari” dan “Wisata”. Pari berarti berulang-ulang, berkali-kali, atau berputar-putar, sedangkan Wisata berarti perjalanan atau bepergian. Dalam arti luas pariwisata merupakan kegiatan rekreasi di luar domisili untuk melepaskan diri dari pekerjaan rutin atau mencari suasana lain. Sebagai suatu aktivitas pariwisata sudah menjadi bagian penting dari kebutuhan dasar masyarakat maju dan sebagian kecil masyarakat negara berkembang.

Menurut **Morgenroth** pada **buku Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata (2017:16)** menyatakan bahwa

“Kepariwisataan dalam arti sempit adalah lalu lintas orang-orang meninggalkan kediamannya untuk sementara waktu untuk berpesiar di tempat lain semata-mata sebagai konsumen dari buah hasil perekonomian dan kebudayaan guna memenuhi kebutuhan hidup dan budayanya atau keinginan yang beraneka ragam dari pribadinya.”

Menurut **Wahab** pada **buku Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata (2017:16)** menyatakan bahwa

“Pariwisata merupakan suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar yang mendapat pelayanan secara bergantian di antara orang-orang dalam suatu negara itu sendiri (di luar negeri), meliputi pendiaman orang-orang dari daerah lain (daerah tertentu), suatu negara atau benua untuk sementara waktu dalam mencari kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang dialaminya di mana ia memperoleh pekerjaan.”

Kemudian menurut **Meyers (2009)** pada **buku Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata (2017:16)** menyatakan bahwa

“Pariwisata adalah aktivitas perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan alasan bukan untuk menetap atau mencari nafkah, melainkan hanya untuk bersenang-senang, memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang atau waktu libur serta tujuan-tujuan lainnya.”

Sedangkan menurut **Buchli** pada **buku Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata (2017:16)** menyatakan bahwa, “Kepariwisataan merupakan setiap peralihan tempat yang bersifat sementara dari seseorang atau beberapa orang dengan maksud memperoleh pelayanan yang diperuntukkan bagi kepariwisataan itu oleh lembaga-lembaga digunakan untuk maksud tertentu”

Dalam **buku Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata (2017:17)**, suatu hal yang sangat menonjol pada batasan-batasan yang dikemukakan di atas bahwa pada intinya apa yang menjadi ciri perjalanan pariwisata adalah sama atau dapat disamakan (walau cara mengemukakannya berbeda), yaitu dalam pengertian kepariwisataan terdapat beberapa faktor penting yaitu:

1. Perjalanan itu dilakukan untuk sementara waktu.
2. Perjalanan itu dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain.
3. Perjalanan itu walaupun apa bentuknya harus selalu dikaitkan dengan rekreasi atau tamasya.
4. Orang yang melakukan perjalanan tersebut tidak mencari nafkah di tempat yang dikunjunginya dan semata-mata sebagai konsumen di tempat tersebut.

Jadi dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa pada hakikatnya pariwisata merupakan suatu proses bepergian sementara waktu dari seseorang atau lebih menuju ke tempat lain di luar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya karena berbagai kepentingan seperti kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan, ataupun kepentingan lain seperti sekedar ingin tahu, menambah pengalaman, ataupun untuk belajar.

Selanjutnya menurut **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata**, menyatakan bahwa:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.



4. Kepariwisataan adalah berbagai keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

#### 2.1.6. Teori Peran

Peran merupakan gambaran sosial tentang diri kita, peran erat kaitannya dengan posisi dan pengaruh seseorang. Pada suatu situasi sosial peran ini didefinisikan sebagai pengharapan dari perilaku seseorang. Apabila kita memandang dari sudut pandang area pekerjaan, individu yang menduduki sesuatu akan dituntut untuk bisa melaksanakan perannya sesuai apa yang menjadi pengharapan pekerjaan tersebut. Istilah peran atau *role* dalam Bahasa Inggris memang merupakan kata yang diambil dari *dramaturgy* atau seni teater. Dalam sebuah seni teater, seorang aktor harus dapat memainkan peran yang dijalankan sesuai alur ceritanya. Kemudian dalam kamus *Oxford Dictionary* istilah *role* diartikan sebagai: *Actor's part; one's task of function*. Yang artinya bagian dari aktor; fungsi tugas seseorang. **Kahn (1964)** mendefinisikan teori peran (*role theory*) yang merupakan penekanan sifat individual seseorang sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku yang sesuai dengan kedudukannya di masyarakat. Artinya ketika seseorang yang memiliki kedudukan telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sejalan dengan kedudukan maka secara umum orang tersebut telah melaksanakan perannya.

Peran menggambarkan interaksi sosial yang diterapkan oleh individu di suatu lingkungan berdasarkan kebudayaan yang berlaku di lingkungan tersebut. Peran merupakan pengharapan yang ditujukan pemegang jabatan pada posisi tertentu. Menurut **Siagian (2006:54)** bahwa “peran merupakan tempat yang ditentukan untuk diduduki oleh seseorang dalam proses pencapaian tujuan”.

Kemudian menurut **Marwanto** yang dikutip oleh **Ndraha (2003:504)** menyatakan bahwa

“Peran adalah tindakan yang diharapkan seseorang dalam sebuah kegiatan yang berhubungan dengan orang lain yang timbul akibat kedudukan yang dimiliki dalam struktur sosial dalam interaksinya dengan sesama seperti antara pemerintah daerah dengan organisasi-organisasi tertentu”

Selanjutnya menurut **Soekanto (2002:243)** bahwa

“Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status) yang bilamana seseorang melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka seseorang tersebut menjalankan sebuah peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya maka seseorang tersebut menjalankan suatu fungsi”

Terdapat juga indikator peran menurut **Soekanto (2002:243)** yang mencakup tiga hal penting yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma atau peraturan yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran merupakan suatu konsep perilaku yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peranan dalam arti ini merupakan sebuah kebijakan yang dibuat.
3. Peran juga dapat artikan sebagai perilaku individu yang penting bagi sebuah struktur sosial dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini berarti individu harus bisa menjalankan hak dan kewajibannya.

Dengan demikian peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa peran merupakan suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan akibat suatu jabatan tertentu atau juga merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial.

## **2.2. Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir merupakan sebuah konsep rangkaian penjelasan mengenai objek suatu permasalahan yang sedang diteliti. Kerangka berpikir merupakan sebuah model dan juga gambaran yang berupa konsep yang menjelaskan mengenai suatu hubungan antara variabel dengan variabel lainnya. Dapat dikatakan juga bahwa kerangka berpikir dibuat berdasarkan adanya suatu rumusan masalah yang telah dibuat dengan berdasarkan adanya suatu proses deduktif di dalam rangka yang menghasilkan beberapa konsep serta juga proposisi yang digunakan untuk memudahkan peneliti dalam merumuskan penelitiannya. Kerangka berpikir mengacu terhadap teori yang berhubungan dengan permasalahan yang kemudian digunakan oleh peneliti sebagai olah ukur atau pisau analisis sejauh mana kenyataan yang terjadi di lapangan kemudian menghasilkan sebuah kesimpulan yang objektif.

Dalam kerangka pemikiran ini peneliti akan menjelaskan objek penelitian dan objek permasalahan mengenai Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Sektor Pariwisata di Desa Baros Kabupaten Bandung yang pada dasarnya sebuah desa memiliki potensi atau ciri khas yang dapat dikelola oleh

BUMDes untuk menjadi daya tarik tersendiri untuk mengundang wisatawan yang pada akhirnya akan menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat setempat dan tentunya laba atau keuntungan untuk menambah Pendapatan Asli Desa (PADes), tetapi kenyataannya masih sulit BUMDes dalam mengelola potensi-potensi tersebut dikarenakan paradigma-paradigma yang muncul sebelumnya mengenai desa adalah sesuatu tempat yang tertinggal dan tidak dapat mandiri yang pada akhirnya terlalu bergantung kepada bantuan pemerintah daerah. Peran BUMDes sangat dibutuhkan untuk mengelola potensi-potensi desa agar nantinya desa dapat berkembang dan berprestasi yang tentunya membuat desa menjadi terkenal dan bisa menjadi daya tarik wisata.

BUMDes memiliki peluang strategis dalam meningkatkan perekonomian desa melalui Sektor Pariwisata desa yang bisa dikelola desa untuk menambah Pendapatan Asli Desa (PADes). Hampir seluruh desa di Indonesia mulai mendirikan BUMDes, namun masih sedikit yang berhasil menyejahterakan masyarakatnya. Belum berhasilnya BUMDes dikarenakan beberapa faktor, mulai dari sumber daya manusia dan kesalahan memilih pengembangan potensi. Pada akhirnya kesejahteraan masyarakat masih jauh dari harapan. Potensi-potensi yang dimiliki oleh desa kadang juga tidak dimaksimalkan dengan baik karena BUMDes tidak dikelola dengan baik. Paradigma-paradigma yang muncul sebelumnya tentang desa dan BUMDes tidak penting dan lebih memilih untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat membuat desa menjadi tidak dibangun dengan baik padahal potensi yang dimiliki sangat besar untuk menambah Pendapatan Asli Desa (PADes) dan juga membantu perekonomian setempat. Khususnya Desa Baros yang

merupakan wilayah desa di Kabupaten Bandung yang terkenal dengan wisata alamnya yang indah. Tetapi lokasi Desa Baros yang terletak di dataran tinggi membuat desa ini terlihat seperti desa pada umumnya padahal Desa Baros memiliki pesona yang begitu indah dengan dataran tinggi khas pegunungan Bandung. Jika BUMDes Baros dapat mengelola potensi-potensi wisata tersebut tentunya sektor wisata di Desa Baros akan meningkat yang akan langsung berdampak kepada kesejahteraan dan perekonomian masyarakat setempat serta tentunya akan membuka lapangan pekerjaan baru.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, peneliti melihat bahwa BUMDes Baros seharusnya bisa lebih memaksimalkan potensi-potensi tersebut serta tentunya dibutuhkan peran BUMDes untuk dapat mengelola sektor wisata yang ada di Desa Baros. Untuk mengukur Peran BUMDes dalam meningkatkan sektor pariwisata di Desa Baros Kabupaten Bandung pada penelitian ini, teori yang digunakan oleh peneliti adalah teori indikator peran menurut **Soekanto (2002:243)** yang mencakup tiga hal penting yaitu:

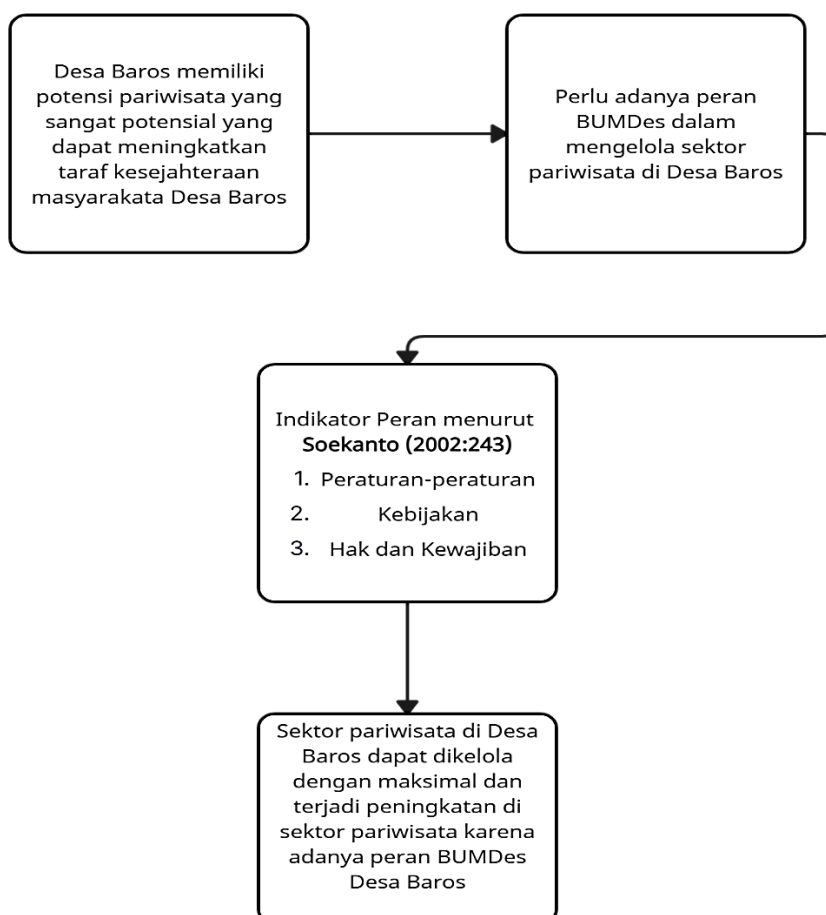
1. Peran meliputi norma-norma atau peraturan yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran merupakan suatu konsep perilaku yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peranan dalam arti ini merupakan sebuah kebijakan yang dibuat.

3. Peran juga dapat artikan sebagai perilaku individu yang penting bagi sebuah struktur sosial dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini berarti individu harus bisa menjalankan hak dan kewajibannya.

Dalam artiannya dapat disimpulkan bahwa indikator peran menurut

**Soekanto (2002:243)** adalah

1. Peraturan-peraturan
2. Kebijakan
3. Hak dan Kewajiban



**Gambar 2.2 Kerangka Berpikir**

Sumber: Diolah oleh peneliti

### 2.3. Proposisi

Proposisi adalah dugaan sementara dari sebuah penelitian terhadap fenomena-fenomena permasalahan yang terjadi. Berdasarkan kerangka pemikiran dan paradigma penelitian pada halaman sebelumnya maka peneliti merumuskan proposisi sebagai berikut:

1. Peran BUMDes Baros dalam meningkatkan sektor pariwisata Desa Baros Kabupaten Bandung masih berjalan kurang efektif dan kurang adanya peran yang signifikan maka perlu memerhatikan indikator peran dari **Soekanto (2002:243)** yaitu: peraturan-peraturan, kebijakan, hak dan kewajiban.
2. Peran BUMDes Baros dalam meningkatkan sektor pariwisata Desa Baros Kabupaten Bandung dirasa masih mengalami hambatan dalam pelaksanaannya.